

LKPD

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



TAHUN 2018



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, pendapatan operasional dan beban, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung Selor, 31 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN



Ir. H. Amir Bakry, MP

NIP. 196402051994031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	28.767.609.482,00	25.822.176.453,00	89,76	32.266.638.976,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	19.166.819.483,00	17.486.980.993,00	91,24	19.295.493.876,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.116.830.333,00	5.930.007.274,00	96,95	3.483.760.418,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.731.489.150,00	9.264.416.219,00	86,33	8.359.100.898,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.318.500.000,00	2.292.557.500,00	98,88	7.452.632.560,00
5 . 2	BELANJA MODAL	9.600.789.999,00	8.335.195.460,00	86,82	12.971.145.100,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	317.482.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	784.500.000,00	777.098.245,00	99,06	550.755.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.731.040.000,00	3.956.039.215,00	83,62	3.214.078.100,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.516.100.000,00	2.032.909.000,00	80,80	5.381.358.000,00
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.569.149.999,00	1.569.149.000,00	100,00	3.507.472.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.767.609.482,00)	(25.822.176.453,00)	89,76	(32.266.638.976,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.767.609.482,00)	(25.822.176.453,00)	89,76	(32.266.638.976,00)

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018

PENGUNA ANGGARAN

Ir. H. AMIR BAKRY, MP

NIP. 19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	20.614.276.040,01	16.511.957.862,66	4.102.318.177,35	24,84
9 . 1 . 1	Beban Pegawai - LO	5.930.007.274,00	3.483.760.418,00	2.446.246.856,00	70,22
9 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	9.181.034.640,67	8.356.999.711,33	824.034.929,34	9,86
9 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 5	Beban Hibah	2.253.572.499,00	2.562.059.560,00	(308.487.061,00)	(12,04)
9 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.249.661.626,34	2.109.138.173,33	1.140.523.453,01	54,08
9 . 1 . 8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan	: 3	Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan	: 3 . 01	Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi	: 3 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi	: 3 . 01 . 01 . 01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(20.614.276.040,01)	(16.511.957.862,66)	(4.102.318.177,35)	24,84
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(20.614.276.040,01)	(16.511.957.862,66)	(4.102.318.177,35)	24,84
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	6.820.279.785,67	6.514.591.110,25	305.688.675,42	4,69
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	6.820.279.785,67	6.514.591.110,25	305.688.675,42	4,69
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.793.996.254,34)	(9.997.366.752,41)	(3.796.629.501,93)	37,98

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018
PENGUNA ANGGARAN

Ir. H. AMIR BAKRY, MP
NIP. 19640205 199403 1 011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	32.893.438.475,92	9.828.900.690,33
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13.793.996.254,34)	(9.997.366.752,41)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(761.363.255,00)	795.265.562,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	25.822.176.453,00	32.266.638.976,00
EKUITAS AKHIR	44.160.255.419,58	32.893.438.475,92

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. H. AMIR BAKRY, MP
NIP. 19640205 199403 1 011



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Per 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
URAIAN	2018	2017
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	16.316.666,67
Persediaan	189.839.100,00	35.274.514,00
JUMLAH ASET LANCAR	189.839.100,00	51.591.180,67
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	587.482.000,00	587.482.000,00
Peralatan dan Mesin	10.306.575.604,00	7.656.448.954,00
Gedung dan Bangunan	24.752.185.609,25	13.106.115.606,25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.149.268.000,00	4.116.359.000,00
Aset Tetap Lainnya	4.062.927.000,00	4.062.927.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	166.650.000,00	2.839.641.434,00
Akumulasi Penyusutan	(8.401.215.962,00)	(5.664.350.349,00)
JUMLAH ASET TETAP	37.623.872.251,25	26.704.623.645,25
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.873.015.568,33	4.682.686.455,00
Aset Lain-lain	1.473.528.500,00	1.455.378.500,00
JUMLAH ASET LAINNYA	6.346.544.068,33	6.138.064.955,00
JUMLAH ASET	44.160.255.419,58	32.894.279.780,92
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	841.305,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
URAIAN	2018	2017
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	841.305,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	841.305,00
EKUITAS		
EKUITAS	44.160.255.419,58	32.893.438.475,92
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	44.160.255.419,58	32.894.279.780,92

PENDAHULUAN

BAB

1

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Walaupun sebagai Daerah Otonom yang relatif masih baru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada umumnya, dengan segala keterbatasan yang ada, baik dari aspek sarana, prasarana, maupun sumber daya manusianya.

Dalam penyelenggaraan proses pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selalu berupaya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pelaksanaan pembangunan diawali dengan proses perencanaan.

Dalam pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tersebut berupa Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mulai diterapkan dalam tahun anggaran 2015, dimana basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Basis Akrua. Namun demikian laporan keuangan dengan Basis Kas juga tetap disajikan. Adapun laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;

- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas serta transparansi yang selanjutnya akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1) Maksud disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD di Provinsi Kalimantan Utara atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Tujuan disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas sumber daya yang dipercayakan. Laporan Keuangan juga disusun guna memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, dan untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan serta untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan juga menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2018 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kalimantan Utara nomor 06 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kalimantan Utara nomor 12 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 13 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Gubernur nomor 30 tahun 2017;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

Memuat informasi tentang: Kebijakan keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab VI Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membuat dan menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018;
- b. Neraca per 31 Desember 2018;
- c. Laporan Operasional per 31 Desember 2018;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018.

Dalam upaya menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 secara baik dan benar tentunya akan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama dan persiapan yang tidak mudah serta adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan di masa-masa yang akan datang, sesuai norma-norma, etika dan standar/peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Dengan demikian, sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan ini disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

BAB 2

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2018.

Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka dapat terpenuhi sekaligus kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan pelaporan dan

Pertanggungjawaban keuangan daerah, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang penerapannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2.1. Kebijakan Keuangan

A. Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Pemungutan pajak-pajak daerah tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai tahun anggaran 2015, karena penyerahan/pemindahan personel dan dokumen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru dilaksanakan tahun 2015. Ketentuan-ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2011 yang berlaku di Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016, Dengan memperhatikan perkembangan permasalahan perekonomian nasional yang dihadapi pada tahun 2018, maka sasaran pendapatan daerah adalah dalam rangka untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari Dana Transfer oleh Pemerintah Pusat, yaitu dengan meningkatkan PAD melalui upaya-upaya intensifikasi dan lebih mengefektifkan penagihan-penagihan kepada Wajib Pajak Daerah.

Pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

B. Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Kelautan dan Perikanan, dana yang disediakan sebesar **Rp. 28.767.609.482,00** akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah sebesar **Rp 22.650.779.149,00** dialokasikan untuk belanja non program sebesar **Rp. 6.116.830.333,00**

Penggunaan belanja daerah selain diarahkan dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, juga telah diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan pelayanan dasar.

Namun demikian, penggunaan Belanja Daerah juga diharapkan akan memberi nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

C. Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan unit kerja yang membidangi urusan pembiayaan tersebut.

Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, dimasa yang akan datang harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi kemungkinan munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 28.767.609.482,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 6.116.830.333,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp 22.650.779.149,00**

Anggaran Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (Nihil) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar Rp Nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (nihil) sebesar Rp Nihil Dana Perimbangan (nihil) sebesar Rp nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah (nihil) sebesar Rp nihil.

Realisasi Pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (nihil) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (nihil) sebesar nihil Pendapatan Transfer (nihil) sebesar nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah (nihil)

Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018:

PROGRAM OPD		ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%	Ket
Kode Program	Uraian				
3.01.3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,737,941,248.00	3,273,627,464.00	87.58	
3.01.3.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	557,000,000.00	480,969,026.00	86.35	
3.01.3.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	84,248,350.00	73,281,178.00	86.98	
3.01.3.01.01.01.15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	824,297,000.00	681,895,597.00	82.72	
3.01.3.01.01.01.16	Program Pengelolaan Kelautan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.347.086.000,00	2.299.593.052,00	97.98	
3.01.3.01.01.01.17	Program Pengembangan Kawasan Konservasi	1.083.795.000,00	1.070.322.376,00	98.76	
3.01.3.01.01.01.18	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.803.080.659,00	2.714.823.360,00	96.85	
3.01.3.01.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	7.985.709.200,00	6.447.788.673,00	80.74	
3.01.3.01.01.01.22	Program Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi	558.224.000,00	368.982.572,00	66.10	

	Database Bidang Kelautan dan Perikanan				
3.01.3.01.01.01.23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1.330.440.000,00	1.293.919.775,00	97.26	
3.01.3.01.01.01.25	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.338.957.692,00	1.186.966.106,00	88.65	
	JUMLAH	22.650.779.149,00	19,892,169,179.00	87.82	

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB

3

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistem Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menganut anggaran surplus / defisit.

Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar Rp nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp nihil Dana Perimbangan sebesar Rp nihil dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp nihil

Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp nihil yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah nihil sebesar Rp nihil Dana Perimbangan sebesar Rp nihil, dan Lain-lain Pendapatan yang sah (pendapatan hibah dan pendapatan lainnya) Rp nihil

Anggaran Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar **Rp. 28.767.609.482,00** Sedangkan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 adalah sebesar **Rp 25,822,176,453.00** yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar terealisasi sebesar **Rp. 5,930,007,274.00** dan belanja langsung/program sebesar **Rp. 19,892,169,179.00**

Dengan demikian terjadi *surplus/defisit* sebesar **Rp. (25,822,176,453.00)** dengan penerimaan pendapatan (Nihil) sebesar Rp nihil dan pengeluaran belanja sebesar **Rp**

25,822,176,453.00 Sedangkan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penerimaan sebesar nihil dan pengeluaran sebesar **0,00** secara rinci realisasi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2018**

PENDAPATAN				0,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0,00
	DANA PERIMBANGAN			0,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			0,00
BELANJA				
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			5,930,007,274.00
		Belanja Pegawai		5,930,007,274.00
	BELANJA LANGSUNG			19,892,169,179.00
		Belanja Pegawai		1,917,329,755.00
		Belanja Barang dan Jasa		9,639,643,964.00
		- Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		2,292,557,500.00
		- Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial		7,347,086,464.00
		Belanja Modal		8,335,195,460.00
		SURPLUS / (DEFISIT)		(25,822,176,453.00)
PEMBIAYAAN DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
PEMBIAYAAN NETTO				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				(25,822,176,453.00)

3.1. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

- Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Masih adanya beberapa pembenahan sistem dalam pengelolaan pendapatan;
- Diperlukan adanya peningkatan pengawasan terhadap perolehan Pendapatan;

- d. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
- e. Masih rendahnya transparansi wajib pajak dalam menyampaikan data yang sebenarnya.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, kalangan pengusaha, akademisi, maupun masyarakat;
- b. Memantapkan kerjasama (*kolaborasi*) antar sektor dalam mengantisipasi akan terjadinya benturan kepentingan terkait dengan penerapan penegakan aturan (*regulatory function*) dan pengelolaan pendapatan (*budgetary function*);
- c. Menjaga keakurasian data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
- d. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap sensitif pada dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
- e. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum Belanja Daerah yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyerapan anggaran cukup baik, hanya kedepan perlu penambahan jumlah pegawai yang masih sedikit dibanding dengan jumlah anggaran yang dikelola secara keseluruhan;
- 2) Pengeluaran yang digunakan untuk Belanja Program Prioritas kepada masyarakat, khususnya infrastruktur masih terbatas.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2015. Kebijakan Akuntansi tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang masih menganut Basis Kas menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

4.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Entitas Akuntansi dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Domisili kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara berada di Jalan Rambutan Gedung Gabungan Dinas Lantai 3, Tanjung Selor - Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan asumsi bahwa :

- (1). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.
- (2). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai suatu entitas akan terus berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- (3). Keterukuran dalam satuan uang, yaitu bahwa setiap kejadian atau transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.
- (4). Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (5). Sedangkan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas dalam Neraca.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak menggunakan istilah laba melainkan menggunakan istilah sisa lebih/kurang perhitungan anggaran (SiLPA/SiKPA) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Surplus/Defisit dalam Laporan Operasional untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran bergantung kepada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan terhadap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam LRA, sedangkan Surplus/Defisit bergantung pada selisih Pendapatan LO dan Beban setelah ditambah atau dikurangi Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional (LO)

- (6). Pada dasarnya, basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas/setara kas diterima di Rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- (7). Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan, Beban dan Pos Luar Biasa, serta aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian/kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanpa memperhatikan saat kas/setara kas diterima atau dibayar.
- (8). Penerapan kebijakan basis kas dan/atau basis akrual tersebut untuk pengakuan pendapatan, belanja, Pendapatan LO, Beban, aset, dan kewajiban secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Untuk pengeluaran melalui bendahara pengeluaran seperti juga diuraikan dalam Lampiran E.II Permendagri Nomor 13/2006 tentang Kebijakan Akuntansi butir 60, diatur sebagai berikut :
 - Selama tahun berjalan, belanja diakui pada saat pertanggung-jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban dalam hal ini termasuk belanja yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas. Kondisi demikian mengakibatkan adanya pengakuan hutang belanja dan memisahkan jumlah kas di bendahara pengeluaran yang disisihkan menjadi rekening "Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek" sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran benar-benar merupakan saldo yang harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah dan termasuk SiLPA.
 - Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Akuntansi persediaan menggunakan *periodic method*, yaitu mencatat persediaan hanya pada akhir periode akuntansi dengan jumlah disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan metode FIFO.
- c. Pendapatan LO diakui:
 - pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
 - Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- d. Beban diakui pada saat:
 - Timbulnya kewajiban, adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.

- Terjadinya konsumsi aset, adalah pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- (1). Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- (2). Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pada dasarnya menggunakan harga perolehan historis dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dengan memakai kurs tengah BI untuk dinyatakan dalam mata uang rupiah;
- (3). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas, atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- (4). Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas/setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- (5). Ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban;
- (6). Penerapan kebijakan basis pengukuran tersebut untuk pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.

- Kas dicatat pada saat diterima atau dibayarkan dengan jumlah sebesar nilai nominal rupiah transaksi.

- Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan termasuk deposito berjangka yang mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
- Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang lain-lain, dsb.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net Realizable Value).

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda dan Piutang Lainnya.

d) Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar sebesar 0,00 % (nol persen);
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10%(sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu dua belas bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan, hewan ternak, alat tulis kantor, suku cadang, dsb.

Termasuk dalam Persediaan adalah Barang/Aset Tetap yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember belum diserahkan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai, sesuai hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam Neraca dinilai berdasarkan :

- a) Biaya perolehan (at cost) bila diperoleh dengan pembelian;
- b) Biaya standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan Persediaan untuk mengukur persediaan dilakukan dengan metode Periodik. Pencatatan pemakaian persediaan menggunakan pendekatan beban. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan nilai persediaan dan beban persediaan.

Persediaan dan Beban Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.

f) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

Investasi jangka panjang permanen dapat terdiri atas :

- a) Penyertaan modal pada BUMN/BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.
- b) Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Investasi jangka panjang non permanen terdiri dari Investasi Dalam Obligasi, investasi dalam dana kredit bergulir dan investasi non permanen lainnya.

- Dana Kredit Bergulir adalah aset pemerintah daerah berupa pinjaman kepada masyarakat yang pelunasannya tidak disetorkan ke kas daerah tetapi digulirkan/dipinjamkan kembali kepada masyarakat dengan catatan bahwa sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemerintah daerah dan dibukukan sebagai penerimaan PAD.
- Investasi jangka panjang diakui berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- Investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat atau investasi jangka panjang non permanen.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

NO	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
	Jatuh tempo pada periode s.d 1 Tahun	0%
	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 3 Tahun	10%
	Jatuh tempok pada periode 3 s.d 5 Tahun	50%
	Jatuh tempo pada periode di atas 5 Tahun	100%

PenK

KKegunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan untuk pelayanan publik, bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/Pihak III.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya.

Aset tetap terdiri atas :

- Tanah;
 - Peralatan dan Mesin;
 - Gedung dan Bangunan;
 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - Aset Tetap Lainnya;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan.
- Aset Tetap diukur berdasarkan nilai historis atau harga perolehan. Jika tidak ada harga perolehan, maka aset tetap dinilai berdasarkan nilai taksiran yang dapat di-pertanggungjawabkan.

- Aset tetap diakui pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Aset tetap Peralatan dan Mesin, yang dicatat dalam Neraca hanya aset tetap yang nilainya satu juta rupiah (Rp1.000.000) atau lebih per satuan/paketnya. Sedangkan untuk aset tetap yang bernilai di bawah satu juta rupiah, dicatat secara ekstra-komtabel.
- Sedangkan Aset tetap konstruksi sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
- Aset tetap yang diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset tetap lainnya, diukur berdasarkan nilai wajar aset tetap yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset tetap yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehannya.
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan.
- Dalam pengakuan aset tetap harus diidentifikasi secara cermat antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama, dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan;
 - b) Pengurangan adalah penurunan nilai karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Pengurangan tersebut didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang;
 - c) Pengembangan adalah peningkatan nilai karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan (a) memperpanjang

usia manfaat (b) meningkatkan efisiensi dan/atau (c) menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap;

- d) Penggantian utama adalah mem-perbaharui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aset tetap, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan dasar harga yang digunakan dalam penilaian aset tetap;
- b) Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- c) Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat/usang, hilang dan sebagainya. Penghapusannya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

h) Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Aset tetap hasil pengadaan/pembelian baru, disusutkan pertama kalinya pada bulan pencatatan aset tetap tersebut.

i) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

j) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri atas:

- a. Piutang Angsuran;
- b. Aset Kemitraan misalnya Built, Operates, and Transfer (BOT);
- c. Aset Tak Berwujud misalnya Goodwill;
- d. Aset Tetap Yang telah diusulkan penghapusannya.
 - Piutang angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, aset tetap lainnya atau hak lainnya kepada pegawai daerah atau non-pegawai.
 - Aset kemitraan misalnya Build, Operates, and Transfer (BOT) adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. BOT diakui berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai dibangun.
 - Aset Tak Berwujud misalnya Goodwill adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat secara fisik tetapi dapat memberikan manfaat kepada entitas (aset yang tidak tampak secara fisik) misalnya Goodwill atau nama baik suatu pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomis kepada pemerintah daerah yang bersangkutan).
 - Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 tahun
 - Aset Tetap yang telah diusulkan penghapusannya adalah Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang sudah tidak bisa digunakan.

k) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- a) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang;
- b) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- c) Hutang Bunga;
- d) Hutang Beban;
- e) Hutang Jangka Pendek Lainnya.

- Bagian lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan hasil pemotongan dari gaji para pegawai yang merupakan kewajiban mereka kepada pihak ketiga untuk disetorkan kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti kepada Negara, BPJS Kesehatan, TASPEN, dsb.
- Hutang bunga merupakan beban yang harus segera dibayar berkaitan dengan penerimaan pinjaman dari lembaga keuangan/bank.
- Hutang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- Hutang Beban yang belum ada SP2D-nya atau dananya belum ke luar dari Rekening Kas Daerah (terhutang di BUD), pembayaran dilakukan dengan menganggarkan ke dalam pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun berikutnya setelah melalui verifikasi validitasnya.
- Hutang jangka pendek lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis hutang tersebut di atas, misalnya denda dan hutang bank jangka pendek.
- Hutang bank diakui pada saat diterimanya pinjaman sebesar nilai nominal rupiah yang diterima.

Hutang bunga dan denda diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah bunga dan denda yang harus dibayar.

- Hutang Beban diakui pada saat diterimanya barang/jasa dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan.

Hutang perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada saat terjadinya hutang sebesar nilai sekarang kas yang akan dibayar.

- Bagian lancar hutang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan yang dilakukan pada tanggal neraca. Bila dalam bentuk valas, bagian yang direklasifikasikan dikonversi ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI per tanggal neraca.

I) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Pada prinsipnya, kewajiban jangka panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

- Pinjaman dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- Pinjaman dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan hutang dalam negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan.
- Pinjaman luar negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- Pinjaman luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah valas hutang luar negeri yang telah diterima dan diakui dalam periode berjalan kemudian dikonversikan ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI per tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang ini terdiri atas :

- a) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
- b) Hutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Hutang kepada Bank Dalam Negeri;
- d) Hutang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank Dalam Negeri;
- e) Hutang Dalam Negeri Obligasi;
- f) Hutang Luar Negeri;
- g) Hutang Jangka Panjang Lainnya.
- m) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lampiran I) yang penerapannya diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan kebijakan akuntansi yang berterima umum untuk hal-hal yang bersifat spesifik.

Penyajian Laporan Keuangan

- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan yang diestimasi.
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar akrual (*Accrual Basis*)
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

Kebijakan Akuntansi Yang Belum Diterapkan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB

5

5.1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006

Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 06 Tahun 2017 (Sebelum Perubahan). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 **sebelum perubahan** adalah sebagai berikut

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	nihil
b. Dana Perimbangan	Rp	nihil
c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	nihil
Jumlah	Rp	nihil

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp	5.116.830.333,00
b. Belanja Langsung	Rp	23.318.954.149,00
Jumlah	Rp	28.435.784.482,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(28.435.784.482,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp	
b. Pengeluaran	Rp	
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	

4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	(28.435.784.482,00)
------------------------------------	----	---------------------

Dalam rangka penyesuaian terhadap realisasi SILPA TA 2018 dan meningkatkan kinerja serta perubahan kondisi ekonomi pada Tahun 2018, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 mengalami perubahan baik dari sisi Pendapatan maupun Belanja.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun Anggaran 2018 tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6 tanggal 28 November 2017.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018 **setelah perubahan** menjadi sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	nihil
b. Berkurang	Rp	(nihil)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	nihil

2. Belanja Tidak Langsung

a. Semula	Rp	5.116.830.333,00
b. Bertambah	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	6.116.830.333,00

3. Belanja Langsung

a. Semula	Rp	23.318.954.149,00
b. Berkurang	Rp	668.175.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	22.650.779.149,00

4. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	
b. berkurang	Rp	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	

5. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	
b. Berkurang	Rp	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -setelah perubahan	Rp	

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 **setelah perubahan** adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp)
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00
8	DANA PERIMBANGAN	
9	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00
10	Dana Alokasi Umum	0,00
11	Dana Alokasi Khusus	0,00
12	Jumlah Dana Perimbangan	0,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
14	Pendapatan Hibah	0,00
15	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
16	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
17	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
18	TOTAL PENDAPATAN	0,00
19	BELANJA	28.767.609.482,00
20	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.116.830.333,00
26	Belanja Pegawai	6.116.830.333,00
27	Belanja Bunga	
28	Belanja Subsidi	
29	Belanja Hibah	
30	Belanja Bantuan Sosial	
31	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
32	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
33	Belanja Tidak Terduga	
34	Jumlah Belanja Tidak Langsung	6.116.830.333,00
35	BELANJA LANGSUNG	22.650.779.149,00
36	Belanja Pegawai	2.352.755.000,00
37	Belanja Barang dan Jasa	10.697.234.150,00
38	Belanja Modal	9.600.789.999,00
39	Jumlah Belanja Langsung	22.650.779.149,00
40	TOTAL BELANJA	28.767.609.482,00
41	SURPLUS /(DEFISIT)	(28.767.609.482,00)
42	PEMBIAYAAN	
43	Penerimaan Pembiayaan	
44	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	
45	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
46	Pengeluaran Pembiayaan	
47	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
48	PEMBIAYAAN NETTO	
49	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	

5.2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SETELAH KONVERSI SESUAI SAP (BERBASIS AKRUAL)

Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Format pendapatan dan belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 komposisi **pendapatan** adalah:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Dana Perimbangan; dan
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Sedangkan menurut SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) terdiri dari:

- Pendapatan Asli Daerah;
- Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Komposisi **belanja** menurut Permendagri 13 Tahun 2006 adalah:

- Belanja Tidak Langsung; dan
- Belanja Langsung.

Sedangkan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) memisahkan antara belanja dan Transfer.

Belanja terdiri dari:

- Belanja Operasi;
- Belanja Modal; dan
- Belanja Tak Terduga.

Transfer terdiri dari:

- Transfer Bagi Hasil Pendapatan; dan
- Transfer Bantuan Keuangan.

Apabila dalam belanja modal/aset terdapat unsur biaya administrasi perlu disesuaikan kedalam kelompok belanja operasi yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Sosial.

Hasil konversi APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Setelah Perubahan, sesuai SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN		
	PENDAPATAN	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
a	Pendapatan Pajak Daerah	Rp.
b	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
A	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp.
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp.
3	Dana Alokasi Umum	Rp.
4	Dana Alokasi Khusus	Rp.
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	Rp.
B	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	
1	Dana Otonomi Khusus	Rp.
2	Dana Penyesuaian	Rp.
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Rp.
	Total Pendapatan Transfer	Rp.
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
A	Pendapatan Hibah	Rp.
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.
BELANJA		
1.	BELANJA OPERASI	19,166,819,483.00
a	Belanja Pegawai	Rp. 6,116,830,333.00
b	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 10,731,489,150.00
c	Belanja Hibah	Rp. 2.318.500.000,00
d	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0
	Jumlah Belanja Operasi	Rp. 19,166,819,483.00

2.	BELANJA MODAL			9,600,789,999.00
	a	Belanja Tanah	Rp.	0
	b	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	784,500,000.00
	c	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.	4,731,040,000.00
	d	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	2,516,100,000.00
	e	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	
	f	Belanja Aset Lainnya	Rp.	1,569,149,999.00
	Jumlah Belanja Modal		Rp.	9,600,789,999.00
3.	BELANJA TAK TERDUGA			
	a	Belanja Tak Terduga	Rp.	
	Jumlah Belanja Tak Terduga		Rp.	
	JUMLAH BELANJA		Rp.	
TRANSFER				
1.	TRANSFER BAGI HASIL PAJAK DAERAH			
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		Rp	
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
	1. Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		Rp	
	1. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya			
	Jumlah Belanja Transfer		Rp.	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		Rp.	
SURPLUS (DEFISIT)			Rp.	
PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Daerah			
		Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp.	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp.	
2.	Pengeluaran Daerah			
	a	Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	
	b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp.	
	Pembiayaan Netto		Rp	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			Rp.	(28,767,609,482.00)

Penjelasan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Hasil Konversi adalah sebagai berikut:

Pendapatan

Jumlah Pendapatan pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 00,00. Jumlah ini sama dengan jumlah pendapatan pada APBD (setelah perubahan) sebesar Rp 00,00.

Jumlah Pendapatan APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pendapatan APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp.	0

Belanja

Jumlah Belanja dan Transfer pada APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil Konversi sebesar Rp 25,822,176,453,00. Jumlah ini sama dengan jumlah belanja pada APBD (setelah perubahan) yang sebesar Rp 25,822,176,453,00

Jumlah Belanja APBD setelah perubahan	Rp	25.822.176.453,00
Jumlah Belanja APBD Hasil Konversi:		
- Belanja	Rp	0
- Transfer	Rp	0
Selisih	Rp	0

Surplus/Defisit

Jumlah defisit pada APBD Hasil Konversi sebesar (Rp 25.822.176.453,00). Jumlah ini sama dengan APBD (setelah perubahan) sebesar (Rp 25.822.176.453,00)

Jumlah Defisit APBD setelah perubahan	Rp	(25.822.176.453,00)
Jumlah Defisit APBD Hasil Konversi	Rp	(25.822.176.453,00)
Selisih	Rp	0

Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto pada APBD Hasil Konversi sebesar Rp 00,00 Jumlah ini sama dengan APBD (setelah perubahan) sebesar Rp 00,00

Jumlah Pembiayaan Netto APBD setelah perubahan	Rp	0
Jumlah Pembiayaan Netto APBD Hasil Konversi	Rp	0
Selisih	Rp	0

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, oleh karenanya Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan (jika ada) diakui pada saat diterima di Rekening Umum Kas Daerah, sedangkan Belanja, Transfer (jika ada) dan Pengeluaran Pembiayaan (jika ada) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

(1). Pendapatan LRA

Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Nihil atau nihil % dari anggaran yang ditetapkan sebesar nihil.

(2). Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 25,822,176,453.00 atau 89.76 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. (28,767,609,482.00) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/kurang
	RP	Rp	%	
Belanja Operasi	19,166,819,483.00	17,486,980,993.00	91.24	
Belanja Modal	9,600,789,999.00	8,335,195,460.00	86.82	
Belanja Tak Terduga				
Jumlah	28,767,609,482.00	25,822,176,453.00	89.76	

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar 17,486,980,993.00 atau 91.24% dari anggarannya sebesar Rp. 19,166,819,483.00

Rincian belanja operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Pegawai	6,116,830,333.00	5,930,007,274.00	96.95	
Belanja Barang dan Jasa	10,731,489,150.00	9,264,416,219.00	86.33	
Belanja Hibah	2,318,500,000.00	2,292,557,500.00	98.88	
JUMLAH	19,166,819,483.00	17,486,980,993.00	91.24	

Rincian realisasi Belanja Operasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai **Rp. 5.930.007.274,00**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2018

Realisasi belanja pegawai sebesar 5.930.007.274.00 (96,95%) dari anggarannya sebesar Rp. 6.116.830.333,00 adalah belanja tidak langsung, dengan uraian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Tot
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.623.618.104,00	2.591.236.924,00	98,77	
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.493.212.229,00	3.338.770.350,00	95,58	
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	00,00	00,00	00,00	
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	00,00	00,00	00,00	
Belanja Uang Lembur	00,00	00,00	00,00	
	6.116.830.333,00	5.930.007.274,00	96,95	

- Belanja Barang dan Jasa **Rp 9,264,416,219.00**

Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap dan belanja pegawai langsung.

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 9.264.416.219,00 adalah Realisasi belanja barang dan jasa di SKPD atau 86,33 % dari anggarannya sebesar 10,731,489,150.00

Realisasi belanja barang dan jasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg	Total
Belanja Bahan Pakai Habis	840.355.996,00	793.095.974,00	94,37	-
Belanja Bahan/Material	533.000.000,00	346.583.650,00	65,02	-
Belanja Jasa Kantor	302.085.000,00	240.015.387,00	79,45	-
Belanja Premi Asuransi	33.646.650,00	25.371.000,00	75,40	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	330.250.000,00	233.100.622,00	70,58	-
Belanja Cetak dan Penggandaan	138.709.000,00	108.381.150,00	78,13	-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	296.050.000,00	191.502.000,00	64,68	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	90.000.000,00	89.643.400,00	99,60	-
Belanja Makanan dan Minuman	664.293.000,00	535.712.950,00	80,64	-
Belanja Perjalanan Dinas	3.032.869.504,00	2.871.233.831,00	94,67	-
Belanja Pemeliharaan	193.850.000,00	185.597.400,00	95,74	-
Belanja Jasa Konsultansi	1.016.000.000,00	1.016.000.000,00	100	-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	41.400.000,00	41.375.000,00	99,94	-
Belanja Honorarium PNS	1.150.905.000,00	828.300.000,00	71,97	-
Belanja Honorarium Non PNS	1.450.050.000,00	1.262.429.755,00	87,06	-
Belanja Transportasi, Akomodasi dan Uang Saku Peserta	611.575.000,00	496.074.100,00	81,11	-
Belanja Barang Milik Daerah yang dibawah Kapitalisasi	6.450.000,00	00.00	00,00	-
	10.731.489.150,00	9.264.416.219,00	86.33	-

Belanja Hibah

Rp. 2,292,557,500.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok

masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah sebesar Rp 2,292,557,500.00 terdiri dari:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2,318,500,000.00	2,292,557,500.00	98.88	
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	00,00	00,00	00,00	00,00
Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar	00,00	00,00	00,00	00,00
	2.318.500.000.00	2.292.557.500.00	98.88	

- Belanja Bantuan Sosial Rp 0,00

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Provinsi kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Belanja Bantuan Sosial tahun 2018 dianggarkan Rp 0, namun tidak ada realisasi.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 8,335,195,460.00 atau 86.82 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 9,600,789,999.00

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	% dari	
	(Rp)	(Rp)	Angg	Total
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	
Belanja Peralatan & Mesin	784,500,000.00	777,098,245.00	99.06	
Belanja Gedung dan Bangunan	4,731,040,000.00	3,956,039,215.00	83.62	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,516,100,000.00	2,032,909,000.00	80.80	
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Belanja Aset Lainnya	1,569,149,999.00	1,569,149,000.00	100.00	
Jumlah	9,600,789,999.00	8,335,195,460.00	86.82	

Rincian realisasi Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Tanah

Rp 0,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018.

- Belanja Peralatan dan Mesin

Rp 777.098.245,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2018 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 777.098.245.00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	300,000,000.00	298,111,999.00	99.37	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor	45,000,000.00	44,825,000.00	99.61	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	147,000,000.00	146,894,000.00	99.93	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	226,000,000.00	221,432,246.00	97.98	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	66,500,000.00	65,835,000.00	99.00	
JUMLAH	784,500,000.00	777,098,245.00	99.06	

- Belanja Gedung dan Bangunan

Rp 3.956.039.215,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan lahan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 3.956.039.215,00 terinci sebagai berikut:

u r a l a n	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Tempat Kerja	3,270,215,000.00	2,573,958,315.00	78.71	

Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1,460.825.000,00	1,382.080.900,00	94,61	
	4,731,040,000,00	3.956.039.215,00	83,62	

- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.032.909.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai, meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

Realisasi belanja jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 2.032.909.000,00, terdiri dari :

uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jalan	2.150.000.000,00	1.680.865.000,00	78,18	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	366.100.000,00	352.044.000,00	96,16	
	2.516.100.000,00	2.032.909.000,00	80,80	

- Belanja Aset Lainnya Rp 1.569.149.000,00

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 desember 2018 untuk memperoleh belanja aset lainnya berupa software, hasil penelitian/kajian yang memberi manfaat jangka panjang, dengan rincian:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% dari	
			Angg.	Tot.
Belanja Modal Aset Lainnya - Software	00,00	00,00		
Belanja Modal Aset Lainnya-Master Plan	1.569.149.999,00	1.569.149.000,00	100	
Jumlah	1.569.149.999,00	1.569.149.000,00	100	

c) Belanja Tak Terduga Rp 00,00

Jumlah belanja tak terduga merupakan belanja yang pengeluarannya tidak dapat diduga secara pasti baik itu besaran jumlah angkanya maupun realisasinya.

(2). Transfer (JIKA ADA) Rp 00,00

Adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3). Surplus/Defisit

Merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan Transfer selama tahun anggaran.

Jumlah realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 00,00 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer masing-masing sebesar Rp 25.822.176.453,00 dan Rp 00,00 dengan demikian mengalami defisit sebesar Rp 25.822.176,453,00 (pendapatan lebih kecil dari pada belanja dan transfer).

(4). Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan netto.

Jumlah pembiayaan netto tahun 2018 sebesar Rp 00,00.

Jumlah tersebut merupakan penerimaan pembiayaan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu.

(5). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp 25.822.176.453,00. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran selama satu tahun anggaran dan setelah memperhitungkan Pembiayaan Netto, dengan rincian sebagai berikut:

-	Pendapatan	Rp	00,00
-	Belanja	Rp	25.822.176.453,00
-	Transfer	Rp	00,00
-	Defisit	Rp	00,00
-	Pembiayaan <i>Netto</i>	Rp	00,00
	SiLPA tahun anggaran 2018	Rp	(25.822.176.453,00)

2) Neraca

Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2018.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban

Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 189.839.100,00 yang terdiri dari:

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Kas Di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas Di bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Piutang Pajak	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
Belanja Dibayar Di Muka	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	189.839.100,00	35.274.514,00
Biaya Dibayar Di Muka	0,00	16.316.666,67
Jumlah	189.839.100,00	51.591.180,67

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 00,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan di SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan telah disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2018.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan Rp 00,00

Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Nihil. Seluruh pendapatan daerah tahun anggaran 2018 telah disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

(3) Kas Lainnya**Rp 00,00**

Kas Lainnya merupakan saldo kas per 31 Desember 2018 selain kas yang berada di RKUD dan kas rekening bendahara penerimaan ataupun pengeluaran.

(4) Piutang Lainnya

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Piutang Lainnya	00,00	00.00
Penyisihan Piutang Lainnya	(00,00)	(00,00)
Piutang Lainnya Netto	00,00	00,00

- Piutang Lainnya

Piutang Lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi.

Saldo Piutang Lainnya sebesar Rp 00,00 terdiri dari:

(4.1) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah**Rp 00,00**

Jumlah tersebut terdiri dari:

• Piutang Pendapatan Jasa Giro	Rp	00.,00
• Piutang pendapatan BLUD	Rp	00,00
Jumlah	Rp	00,00

Piutang Jasa Giro merupakan pendapatan Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah bulan Desember 2018 yang sampai dengan 31 Desember 2018 belum diterima pembayarannya.

(4.2) Piutang Transfer Pemerintah**Rp****00,00**

Piutang Transfer Pemerintah sebesar Rp 00,00 merupakan Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2014 dan tahun 2015 dari pemerintah pusat yang per tanggal 31 Desember 2016 belum disalurkan. Jumlah tersebut telah diterima seluruhnya di rekening Kas Umum Daerah pada bulan Februari tahun 2018.

- Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo penyisihan piutang lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 00,00 , yaitu penyisihan atas Piutang Pendapatan BLUD

- Piutang Lainnya Netto

Saldo Piutang Lainnya Netto adalah piutang lainnya setelah dikurangi Penyisihan Piutang. Saldo Piutang Lainnya Netto adalah Rp 00,00.

- Piutang Lainnya	Rp	00,00
- Penyisihan Piutang (Pendapatan BLUD)	Rp	00.00
Piutang Lainnya netto	Rp	00,00

(5) Persediaan

Rp 189.839.100.00

Persediaan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Persediaan	189.839.100,00	35.274.514,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 189.839.100,00 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Alat Tulis Kantor	Rp	46.802.690,00
Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp	1.010.460,00
Suku Cadang Sarana Mobilitas	Rp	-
Obat-obatan	Rp	-
Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp	738.100,00
Barang Cetakan	Rp	2.310.000,00
Makanan Pokok	Rp	-
Barang Kuasi	Rp	-
Perlengkapan Dinas, Perlengkapan Olahraga dan Keterampilan	Rp	157.850,00
Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat (Hibah)	Rp	138.820.000,00
Persediaan Barang Habis Pakai Lainnya	Rp	-
Jumlah	Rp	189.839.100,00

- (a) Persediaan ATK dan barang habis pakai sebesar Rp 46.802.690,00 merupakan persediaan alat-alat tulis kantor yang masih tersisa di akhir tahun 2018.

- (b) Persediaan Alat-Alat Listrik dan elektronik sebesar Rp 1.010.460,00 berupa peralatan listrik yang belum digunakan di akhir tahun 2018.
- (c) Persediaan kebersihan dan bahan pembersih Rp 738.100,00 adalah persediaan bahan-bahan untuk kebersihan kantor di akhir tahun 2018 yang belum digunakan.
- (d) Persediaan Barang Cetakan adalah persediaan map dinas yang belum digunakan Rp. 2.310.000,00
- (e) Persediaan Perlengkapan Dinas, Perlengkapan Olahraga dan Keterampilan Rp. 157.850,00.
- (f) Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp. 138.820.000,00 berupa

(8) Biaya Dibayar Di Muka (JIKA ADA) Rp 00,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Beban Dibayar Di Muka	Rp 00,00	16.316.666,67

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 00,00. Saldo Rp. 16.316.666,67 adalah sewa kantor yang sudah dibayar di tahun 2017 dan masa pemakaian sampai dengan tahun 2018.

ASET TETAP Rp 37,623,872,251.25

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap Per 31 Desember 2018, dengan rincian:

N O	Klasifikasi	Saldo Per 31-12- 2017 (RP)	Penambahan Dari Mutasi Tahun 2018 (RP)	Pengurangan Dari Mutasi Tahun 2018 (RP)	Saldo Per 31-12- 2018 (Rp)
1	Tanah	587,482,000.00	00,00	00,00	587,482,000.00
2	Peralatan dan Mesin	7,656,448,954.00	2,835,362,245.00	185,235,599,00	10,306,575,600.00
3	Gedung dan Bangunan	13,106,115,606.25	12,483,340,003.00	837,270,000,00	24,752,185,609.25
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,116,359,000.00	2,032,909,000.00	00,00	6,149,268,000.00
5	Aset Tetap Lainnya	4,062,927,000.00	00,00	00,00	4,062,927,000.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,839,641,434.00	00,00	2,672,991,434,00	166,650,000.00
7	Akumulasi Penyusutan	(5,664,350,349,00)	00,00	00,00	(8,401,215,962,00)
	Total Aset Tetap	26,704,623,645.25	17,351,611,248.00	3.602.916.433,00	37,623,872,251.25

Mutasi penambahan aset tetap tahun 2018 berasal dari realisasi Belanja Modal dan non Belanja Modal, reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya dan hibah.

Pengurangan aset tetap tahun 2018 berasal dari koreksi pengurangan aset tetap dan reklasifikasi dari jenis aset tetap yang lainnya.

Rincian lebih lanjut tentang Aset Tetap per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Lampiran III.

1) Tanah		Rp. 587,482,000.00
	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
Tanah	587,482,000.00	587,482,000.00

Saldo Tanah per 31 Desember 2018 merupakan nilai perolehan tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk di dalam aset tetap tanah adalah tanah di bawah badan jalan.

Dibandingkan saldo Tanah tahun 2017 sebesar Rp 587,482,000.00 maka tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 00,00

2) Peralatan dan Mesin **Rp 10.306.575.604,00**

	31 Desember 2018	31 Desember 2017
	(Rp)	(Rp)
	10.306.575.604,00	7.656.448.954,00

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Peralatan dan Mesin tersebut meliputi : alat-alat angkutan darat bermotor roda 4, inventarisir kantor dll dan dimanfaatkan lebih dari 12 bulan (1 tahun).

Dibandingkan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp 7.656.448.954,00 maka tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.650.126.646,00. Kenaikan sebesar nilai tersebut terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2017		7.656.448.954,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal	777.098.245,00
2	Reklasifikasi dari Gedung dan bangunan ke Peralatan dan Mesin	811.940.000,00
3	Mutasi tambah P3D – Hibah Peralatan dan Mesin P3D dari Pelabuhan Tengkyu 2	1.246.324.004,00
Total Mutasi Tambah		2.835.362.245,00

	Jumlah	10.491.811.199,00
	Mutasi Kurang	
1	Belanja Modal yang menjadi Belanja Barang/ Persediaan	12.804.000,00
2	Belanja Modal yang nilainya dibawah kapitalisasi	17.700.000,00
3	Belanja Modal yang akan diserahkan ke masyarakat	99.834.999,00
4	Mutasi BMD – Mutasi ke Dinas Sosial	54.896.600,00
	Total Mutasi Kurang	185.235.599,00
	Saldo per 31 Desember 2018	10.306.575.604,00

Reklaisifikasi dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin Rp. 811.940.000, terdiri dari :

- Dari Gedung Genset PPI Sebatik Rp. 561.000.000
- Dari Gedung Perbengkelan Rp. 136.440.000
- Dari Gedung Pertokoan Rp. 9.000.000
- Dari Gedung Wisma Nelayan Rp. 105.500.000

3) Gedung dan Bangunan Rp 24.752.185.609,25

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Gedung dan Bangunan	24.752.185.609,25	13.106.115.606,25

Jumlah tersebut merupakan nilai perolehan aset tetap Gedung dan bangunan, termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, yang meliputi harga beli atau nilai pembangunan, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi meliputi nilai kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dikeluarkan sehubungan konstruksi dan dibayar kepada pihak selain dari kontraktor.

Dibandingkan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2017 sebesar Rp 13.106.115.606,25 maka tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.646.070.003,00 Kenaikan sebesar nilai tersebut terdiri dari:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2017	13.106.115.606,25
	Mutasi Tambah	
1	Realisasi Belanja Modal	3.956.039.215,00
2	Belanja Barang yang menjadi Aset Tetap	120.796.354,00
3	KDP Tahun Lalu yang telah menjadi Aset Tahun ini	2.672.991.434,00
4	Mutasi Tambah P3D – Hibah Gedung dan Bangunan P3D Dari Pelabuhan Tengkyu 2	5.733.513.000,00
	Total Mutasi Tambah	12.483.340.003,00

	Jumlah	25.589.455.609,25
Mutasi Kurang		
1	Belanja Modal yang menjadi Belanja Barang/ Persediaan	7.180.000,00
2	Belanja Modal yang akan diserahkan ke masyarakat	18.150.000,00
3	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	811.940.000,00
	Total Mutasi Kurang	837.270.000,00
	Saldo per 31 Desember 2018	24.752.185.609,25

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp 6.149.268.000,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.149.268.000,00	4.116.359.000,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya konstruksi sampai jaringan tersebut siap digunakan/dimanfaatkan.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2017	4.116.359.000,00
Mutasi Tambah		
1	Realisasi Belanja Modal	2.032.909.000,00
	Jumlah	6.149.268.000,00
Mutasi Kurang		
1	Koreksi belanja modal Pembuatan Jaringan Air Bersih di Kabupaten Malinau	00,00
2	Reklas ke Aset Tetap Lainnya	00,00
3	Reklas ke Aset Tanah	00,00
4	Koreksi belanja modal atas aset kabupaten/kota	00,00
5	Reklas ke KDP	00,00
	Jumlah	
	Saldo per 31 Desember 2016	6.149.268.000,00

5) Aset Tetap Lainnya

Rp 4.062.927.000,00

Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap pakai/ digunakan.

Jumlah nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.062.927.000,00. dibanding tahun 2017 terjadi penambahan sebesar Rp 00,00. Penambahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	NILAI (RP)
Saldo per 31 Desember 2017		4.062.927.000,00
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal	00,00
2	Reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan	00,00
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan	00,00
5	Reklas dari Aset Tetap Lainnya (ATR)	00,00
	Jumlah	4.062.927.000,00
Mutasi Kurang		
6	Belanja Modal direalisasikan ke Belanja Barang Jasa (Barang yang akan diserahkan pada masyarakat)	00,00
7	Reklas ke Aset Lainnya	00,00
8	Reklas ke Peralatan dan Mesin	00,00
	Jumlah	
Saldo per 31 Desember 2018		4.062.927.000,00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	166.650.000,00	2.839.641.434,00

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun atau belum dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Nilai perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp 166.650.000,00, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo per 31 Desember 2017		2.839.641.434,00
Mutasi Tambah		
1	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	00,00
2	Perencanaan/Pengawasan dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa	00,00
3	Reklas dari Aset Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan	00,00
	Jumlah	
Mutasi Kurang		
1	KDP Tahun Lalu yang telah menjadi aset Tetap Tahun Ini	2.672.991.434,00
2	Reklas ke Aset Tetap (eks hibah Aset Tetap dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur)	
	Jumlah	
	Kenaikan/ (Penurunan)	
Saldo per 31 Desember 2018		166.650.000,00

(1) Akumulasi Penyusutan (Rp 8.401.215.962,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember tahun 2018 adalah sebesar (Rp 8.401.215.962,00) termasuk akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan 31 Desember Rp (Rp. 5.664.350.349,00) 2017

- Beban Penyusutan tahun 2018	Rp	
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Hibah dari Pemprov Kaltim	Rp	
- Penghapusan Aset Tetap	Rp	
Akumulasi Penyusutan tahun 2018	Rp	(Rp.8.401.215.962,00)

Aset Lainnya

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	4.873.015.568,33	4.682.686.455,00
Aset Lain-Lain	1.473.528.500,00	1.455.378.500,00
	6.346.543.068,33	6.138.064.955,00

(1) Aset Tidak Berwujud Rp 4.873.015.568,33

Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik (penyusunan dokumen kajian kesesuaian lahan ekosistem mangrove, pemetaan lahan tambak, penyusunan dokumen study teknis pencadangan kawasan konservasi)

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.873.015.568,33

(2) Aset Lain-lain Rp 1.473.528.500,00

Aset lain-lain Per 31 Desember 2017 senilai Rp. 1.455.378.500, sedangkan per 31 Desember 2018 senilai Rp. 1.473.528.500,- artinya terdapat kenaikan sebesar Rp. 18.150.000, berupa bangunan yang direklas ke aset lainnya (pengawasan pembangunan balai pertemuan masyarakat nelayan pesisir).

Kewajiban Jangka Pendek

(1) Utang PFK

Rp 00,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Utang PFK	00,00	00,00

Utang PFK merupakan utang perhitungan pihak ketiga yang berasal dari pungutan PFK namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum disetor dan masih tersimpan di rekening Kas Daerah, dengan perincian sebagai berikut:

N O	URAIAN	Saldo (Rp)
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	00,00
2	IWP	00,00
3	Dst.	00,00
	Jumlah	00,00

(2) Utang Beban Rp 00,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Utang Beban	00,00	841.305,00

(3) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 00,00

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Utang	00,00	00,00

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca per 31 Desember 2018 berasal dari Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas. Saldo ekuitas tersebut didalamnya sudah termasuk SAL akhir.

	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
Ekuitas	44.160.255.419,58	32.893.438.475,92

Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 32.893.438.475,92. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 11.266.816.943,66

3) Laporan Operasional

Adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Penjelasan atas masing-masing unsur dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

(1). Beban

Realisasi Beban sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.614.276.040,01 dengan rincian sebagai berikut:

U r a i a n	Realisasi (Rp)
Beban Operasi	20.614.276.040,01
Beban Transfer	00,00
Defisit Non Operasional	00,00
Beban Luar Biasa	00,00
Jumlah	20.614.276.040,01

(1.1) Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 20.614.276.040,01 dengan rincian beban sebagai berikut:

U r a i a n	Saldo (Rp)
Beban Pegawai – LO	5.930.007.274,00
Beban Barang dan Jasa – LO	9.181.034.640,67

Beban Subsidi	
Beban Hibah – LO	2.253.572.499,00
Beban Bantuan Sosial	
Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	3.249.661.626,34
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Lain-lain	
	20.614.276.040,01

- **Beban Pegawai - LO** **Rp 5.930.007.274,00**

Adalah beban pemerintah daerah untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah sampai dengan 31 Desember 2018. Jumlah beban pegawai sebesar Rp 5.930.007.274,00 tersebut telah dibayarkan seluruhnya dalam tahun 2018.

Beban pegawai dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.709.207.289,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	172.525.624,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	289.170.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	00,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	33.985.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	93.639.060,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	231.345.316,00
Beban Pembulatan Gaji - LO	25.674,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	47.841.977,00
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian – LO	13.496.984,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	3.338.770.350,00

- **Beban Barang dan Jasa** **Rp 9.181.034.640,67**

Jumlah tersebut merupakan beban pemerintah daerah untuk barang-barang pakai habis dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap.

Rincian Beban barang dan jasa dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO (Rp)
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	94.417.975,00
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.379.465,00

Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.096.000,00
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13.216.654,00
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	243.230.904,00
Beban Persediaan Perlengkapan Peserta Pelatihan	414.478.240,00
Beban Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman	197.136.000,00
Beban Persediaan Bahan Pameran/ Expo	29.953.000,00
Beban Pemberian Penghargaan/ Cenderamata, Hadiah & Piagam	28.688.000,00
Beban Bahan Perlengkapan & Peralatan (Non Aset Tetap)	54.945.850,00
Belanja Persediaan Bahan Perlengkapan Lainnya	55.686.950,00
Beban Jasa Telepon	278.737,00
Beban Jasa Listrik	9.690.195,00
Beban Jasa Surat Kabar/ Majalah	6.070.000,00
Beban Jasa Kawat/ Faksimili/ Internet	12.603.650,00
Beban Jasa Paket/ Pengiriman	36.000,00
Beban Pubilkasi	73.875.500,00
Beban Jasa Dekorasi	136.620.000,00
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	25.371.000,00
Beban Jasa Service	3.822.700,00
Beban Penggantian Suku Cadang	49.386.422,00
Beban Bahan Bakar Minyak, Gas, dan Pelumas	164.066.400,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	15.825.100,00
Beban Cetak	85.193.750,00
Beban Penggandaan	14.877.400,00
Beban Penjilidan	6.000.000,00
Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	92.188.666,67
Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	115.630.000,00
Beban Sewa Sound System/ Electone	17.850.000,00
Beban Sewa Peralatan & Perlengkapan Lainnya	74.793.400,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	128.750.000,00
Beban Makanan dan Minuman Tamu	41.507.950,00
Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	365.635.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.379.711.958,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.313.111.872,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	57.613.647,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.849.400,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	178.748.000,00
Beban Jasa Konsultansi Jasa Lainnya	1.016.000.000,00
Beban Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	41.375.000,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	572.000.000,00
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa - LO	75.650.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ I/N – LO	6.000.000,00
Beban Honorarium PNS Lainnya – LO	114.900.000,00

Beban Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan – LO	59.750.000,00
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narsum – LO	173.400.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap – LO	1.089.029.755,00
Beban Transportasi	184.488.100,00
Beban Akomodasi	136.861.000,00
Beban Uang Saku Peserta	174.725.000,00
Beban Pengadaan Alat Ukur Dibawah Kapitalisasi	17.700.000,00

- Beban-Beban

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp 3.249.661.626,34

Adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), yang perhitungannya dilakukan secara bulanan.

Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa manfaat yang dimiliki masing-masing aset tidak berwujud atau berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian/kontrak.

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 3.249.661.626,34 yang merupakan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset murni perolehan Pemerintah Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2018. Berikut Rinciannya :

Uraian	Saldo (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.423.871.447,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	172.367.847,67
Beban Penyusutan Jalan	274.602.445,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.378.819.886,67

- **Beban Penyisihan Piutang** **Rp 00,00**

Merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Saldo Beban Penyisihan Piutang adalah nihil, karena seluruh piutang umurnya di bawah satu tahun.

Uraian	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak	00,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	
Jumlah	00,00

- **Beban Lain-Lain** **Rp 00,00**

Adalah beban operasi yang tidak masuk kategori di atas.

Saldo Beban Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2018 adalah Rp 00,00.

Surplus/Defisit - LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa. Saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2018 adalah (Rp 20.614.276.040,01) dengan rincian:

- Pendapatan-LO	Rp	0,00
- Total Beban	Rp	20.614.276.040,01
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp	(20.614.276.040,01)
Pendapatan Luar Biasa	Rp	6.820.279.785,67
Surplus/Defisit –LO	Rp	(13.793.996.254,34)

4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- Ekuitas awal;
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
- Ekuitas akhir.

Perubahan Ekuitas periode tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

-	Ekuitas Awal	Rp	32.893.438.475,92
-	Surplus/Defisit – LO	Rp	(13.793.996.254,34)
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
-	Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
-	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
-	Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	(761.363.255,00)
-	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp	25.822.176.453,00
-	Ekuitas Akhir	Rp	44.160.255.419,58

(1). Ekuitas Awal

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Awal adalah sebesar Rp 32.893.438.475,92.

(2). Surplus/Defisit – LO

Adalah selisih antara realisasi total Pendapatan-LO dengan total beban selama tahun anggaran, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan pos Luar Biasa.

Sesuai dengan Laporan Operasional, saldo Surplus/Defisit – LO sampai dengan 31 Desember 2018 adalah (Rp 13.793.996.254,34)

(3). Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan koreksi-koreksi yang disebabkan karena kesalahan mendasar atau perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya.

Koreksi-koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya tersebut adalah:

a) Koreksi Nilai Persediaan

Sehubungan dengan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, terjadi perubahan kebijakan akuntansi terhadap akun persediaan.

b) Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp. 761.363.255,00) adalah koreksi yang berdampak terhadap laporan keuangan sebelumnya

(4). Ekuitas Akhir

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada awal tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp 44.160.255.419,58. Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2018.

PENUTUP

BAB

6

6.1 Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terdiri atas:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Catatan Atas Laporan Keuangan
-

6.2 Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), realisasi Belanja Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2018 sebesar Rp 25.822.176.453,00 terdiri dari :

➤ Belanja Operasi	Rp	17.486.980.993,00
➤ Belanja Modal	Rp	8.335.195.460,00
➤ Belanja Tak Terduga	Rp	00,00
➤ Transfer	Rp	00,00
Jumlah	Rp	25.822.176.453,00

6.3 Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2018 menunjukkan Jumlah Aset Rp 44.160.255.419,58 Jumlah Kewajiban Rp 00,00 dan Jumlah Ekuitas Rp 44.160.255.419,58 sehingga Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp 44.160.255.419,58.

6.4 Laporan Operasional (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), Pendapatan LO sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 00,00,

sedangkan Beban sebesar Rp 20.614.276.040,01, dan Pendapatan Luar Biasa Rp. 6.820.279.785,67 sehingga Defisit LO adalah (Rp 13.793.996.254,34)

- 6.5 Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp 44.160.255.419,58. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal sebesar Rp 32.893.438.475,92, maka terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 11.266.816.943,66.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini, semoga dapat memperjelas semua pihak dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi maju dan yang terdepan.

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

MUTASI TAMBAH

[illegible]

[illegible]

	X.	STS atas Pengadaan Tahun 2018											-	
													-	
	XI.	Mutasi BMD		54,896,600.00									54,896,600.00	
	XII	Putang (uang titipan pengadaan lahan)												
													-	
	TOTAL MUTASI KURANG		-	185,235,599.00	837,270,000.00	-	-	-	-	2,672,991,434.00	-	-	3,695,497,033.00	-
	Saldo Per-31 Desember 2018.		587,482,000.00	10,306,575,604.00	24,752,185,609.25	6,149,268,000.00	4,062,927,000.00	-	-	166,650,000.00	-	-	46,025,088,213.25	9,438,022,600.00

Keterangan :

KDP tahun lalu yang sudah menjadi aset tahun ini (Gedung dan Bangunan)		Belanja Modal yang akan diserahkan ke masyarakat.	
Bangunan Gedung tempat pertemuan :	18,150,000.00	Demplot :	298,111,999.00 (peralatan dan mesin)
Mess BBI :	2,654,841,434.00	Bangunan gedung tempat pertemuan	18,150,000.00 (Gedung dan Bangunan)
Total	2,672,991,434.00		
mutasi ke dinas sosial		Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	
54,896,600.00		819,120,000.00	
Hibah Peralatan dan Mesin P3D dari Pelabuhan Teng McKay 2	1,246,324,004.00	Rincian :	
Hibah Gedung dan Bangunan P3D dari Pelabuhan Teng McKay 2	5,733,513,000.00	Dari Gedung Genset PPI Sebatik	561,000,000.00
Belanja Barang & Jasa dipindah ke Gedung dan Bangunan :	120,796,354.00	Dari Gedung perbengkelan	143,620,000.00
		Dari Gedung Pertokoan	9,000,000.00
		Dari gedung wisma nelayan	105,500,000.00
		Total	819,120,000.00

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PERSEDIAAN

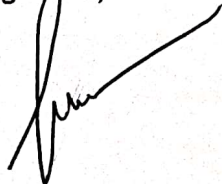
Pada Hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** telah dilakukan pemeriksaan fisik atas Barang-Barang Persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 46.802.690
2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	Rp. -
3	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Rp. 1.010.460
4	Persediaan Perangko, Materai, Kuasi dan Benda Pos Lainnya	Rp. -
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp. 738.100
6	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas, dan Bahan Pelumas	Rp. -
7	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp. -
8	Persediaan Isi Tabung Gas	Rp. -
9	Persediaan Barang Cetakan	Rp. 2.310.000
10	Persediaan Bahan Baku Bangunan dan Bahan Baku Bidang Pengairan	Rp. -
11	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	Rp. -
12	Persediaan Bibit Temak dan Perikanan	Rp. -
13	Persediaan Bahan Obat-Obatan	Rp. -
14	Persediaan Bahan Kimia	Rp. -
15	Persediaan Bahan Makanan Pokok dan Makanan Gizi	Rp. -
16	Persediaan Perlengkapan Dinas, Perlengkapan Olahraga dan Keterampilan	Rp. 157.850
17	Persediaan Bahan Bantu Laboratorium dan Kedokteran dan Alat Kesehatan	Rp. -
18	Persediaan Suku Cadang	Rp. -
19	Persediaan Barang dalam Proses dan Cadangan Lainnya	Rp. -
20	Persediaan Bahan Peledak	Rp. -
21	Persediaan Perabot Dapur dan Perabot Rumah Tangga	Rp. -
22	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga (Hibah)	Rp. 138.820.000
	JUMLAH	Rp. 189.839.100

Rincian atas Barang-barang Persediaan tersebut sebagaimana terlampir. Demikian Berita Acara

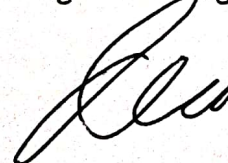
Pemeriksaan Persediaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sesuai keperluan.

Mengetahui,



Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP. 19640205 199403 1 011

Dibuat Oleh
Pengurus Barang



Diah Nur Maulida, S.Pi
NIP. 19920911 201503 2 004

No.

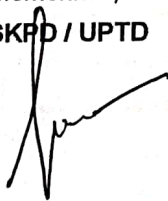
Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

SKPD / UPT : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.02.07.067	Piala K2	0	0,00	1	748.000,00	1	748.000,00	0	0,00
117.02.07.073	Perlengkapan Pelatihan	0	0,00	1	19.999.650,00	1	19.999.650,00	0	0,00
117.02.07.073	Perlengkapan Kegiatan Hari Nusantara	0	0,00	3	40.994.800,00	3	40.994.800,00	0	0,00
117.02.07.073	Bahan Pameran	0	0,00	2	29.953.000,00	2	29.953.000,00	0	0,00
117.03.01.003	Perlengkapan Sekolah Catar Catir	0	0,00	2	33.463.100,00	2	33.463.100,00	0	0,00
117.03.01.003	Waring	0	0,00	1	199.056.000,00	1	199.056.000,00	0	0,00
117.03.01.003	Handphone Android	0	0,00	50	197.175.000,00	50	197.175.000,00	0	0,00
117.03.01.003	Kincir Air	0	0,00	1	111.584.000,00	1	111.584.000,00	0	0,00
117.03.01.003	Mesin Genset	0	0,00	1	199.100.000,00	1	199.100.000,00	0	0,00
117.03.01.003	Benih Ikan Air Tawar	0	0,00	1	64.500.000,00	1	64.500.000,00	0	0,00
117.03.01.011	Bibit Mangrove	0	0,00	1	197.136.000,00	1	197.136.000,00	0	0,00
117.03.01.015	Doo prize	0	0,00	1	29.924.400,00	1	29.924.400,00	0	0,00
117.03.01.015	Pelampung Penanda Batas (Buoy)	0	0,00	1	138.820.000,00	0	0,00	1	138.820.000,00
117.03.01.015	Speedboard	0	0,00	1	495.000.000,00	1	495.000.000,00	0	0,00
117.03.01.015	Mesin Cool Room	0	0,00	1	579.150.000,00	1	579.150.000,00	0	0,00
117.03.01.015	Baju Kaos Lengan Panjang (Diserahkan Pihak 3)	0	0,00	1	123.750.000,00	1	123.750.000,00	0	0,00
117.03.01.015	Kapur	0	0,00	1	29.535.000,00	1	29.535.000,00	0	0,00
	JUMLAH	0	35.250.094,00	0	3.284.845.249,00	0	3.130.280.663,00	0	189.814.680,00

Yang memeriksa,
Kepala SKPD / UPTD



Ir. H. Amir Bakry, MP
NIP : 19640205 199403 1 001

Penyimpan Barang



Diah Nur Maulida, S.Pi
NIP : 19920911 201503 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Laporan Daftar Persediaan

SKPD / UPTD : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sampai tanggal : 31-Desember-2018

Kode Rekening	Nama Persediaan	Jumlah Unit	Satuan	Harga/Unit	Total
117.01.01.002.30	Amplop Paper Line Besar Tanpa Merk	10	Kotak	30.580,00	305.800,00
117.01.01.003.1	Ballpoint Pilot Baliner BI-5M Tanpa Merk	40	Buah	24.530,00	981.200,00
117.01.01.003.16	Ballpoint Pilot G-207 Tanpa Merk	150	Buah	24.530,00	3.679.500,00
117.01.01.005.41	Buku Kwitansi (isi 40 Lembar) Tanpa Merk	10	Buah	6.160,00	61.600,00
117.01.01.012.9	Trigonal Clip No.3 Tanpa Merk	5	Kotak	3.740,00	18.700,00
117.01.01.014.1	File Box Besar Tanpa Merk	5	Buah	24.530,00	122.650,00
117.01.01.020.3	Gunting Besar Tanpa Merk	2	Buah	12.320,00	24.640,00
117.01.01.021.6	Staples Hd 10 Tanpa Merk	4	Buah	22.000,00	88.000,00
117.01.01.022.17	Isi Staples No.3 Tanpa Merk	13	Kotak	8.580,00	111.540,00
117.01.01.022.5	Isi Staples No. 10 Tanpa Merk	5	Kotak	4.950,00	24.750,00
117.01.01.027.3	Binder Clip No. 155 Tanpa Merk	40	Kotak	2.530,00	101.200,00
117.01.01.036.2	Kertas A3 70 Gr Tanpa Merk	20	Rim	117.700,00	2.354.000,00
117.01.01.038.2	Kertas F4 70 Gr Tanpa Merk	20	Rim	66.220,00	1.324.400,00
117.01.01.056.1	Lem Stick Kecil Tanpa Merk	36	Buah	12.320,00	443.520,00
117.01.01.061.17	Map Jepit (ATK) Tanpa Merk	22	Buah	15.950,00	350.900,00
117.01.01.078.15	Lakban Hitam 2" Tanpa Merk	2	Buah	22.000,00	44.000,00
117.01.01.078.19	Lakban Bening 2" Tanpa Merk	2	Buah	17.160,00	34.320,00
117.01.01.078.23	Lakban Double Tip 1 " Tanpa Merk	8	Buah	12.320,00	98.560,00
117.01.01.091.6	Spidol Boardmaker Black Tanpa Merk	3	Buah	8.140,00	24.420,00
117.01.01.093.2	Stabilo Kecil Tanpa Merk	10	Buah	9.900,00	99.000,00
117.01.01.097.5	Stopmap Folio Kertas Tanpa Merk	30	Buah	3.630,00	108.900,00
117.01.01.101.38	Tinta Epson 6644 Tanpa Merk	6	Botol	159.500,00	957.000,00
117.01.01.118.3	Kertas Ncr Folio 5 Ply Tanpa Merk	190	Rim	176.000,00	33.440.000,00
117.01.01.119.10	Post-It Kecil Tanpa Merk	2	Buah	8.580,00	17.160,00
117.01.01.119.13	Post-It Sedang Tanpa Merk	5	Set	24.530,00	122.650,00
117.01.01.121.109	Clear Holder 80 Tanpa Merk	38	Buah	49.060,00	1.864.280,00
	SUB TOTAL Persediaan Alat Tulis Kani			0,00	46.802.690,00
117.01.03.002.4	Baterai A3 Tanpa Merk	4	Buah	14.740,00	58.960,00
117.01.03.007.19	Kabel Listrik Tanpa Merk	1	Gulung	495.000,00	495.000,00
117.01.03.019.2	Steker Dengan Arder Tanpa Merk	3	Buah	16.500,00	49.500,00
117.01.03.020.14	Stop Kontak Tanpa Merk	3	Buah	22.000,00	66.000,00
117.01.03.028.66	Niso Ducting Tc-4 Tanpa Merk	31	Buah	11.000,00	341.000,00
	SUB TOTAL Persediaan Alat Listrik Dai			0,00	1.010.460,00
117.01.05.008.7	Kanebo Spon Tanpa Merk	1	Buah	78.650,00	78.650,00
117.01.05.010.22	Sabun Cuci Tangan Botol Tanpa Merk	4	Buah	38.500,00	154.000,00
117.01.05.011.12	Pengharum Ruangan Otomatis Kecil Tanpa Merk	1	Buah	81.400,00	81.400,00
117.01.05.016.17	Spon Pencuci Piring Tanpa Merk	6	Buah	3.850,00	23.100,00

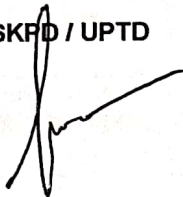
Laporan Daftar Persediaan

SKPD / UPTD : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sampai tanggal : 31-Desember-2018

Kode Rekening	Nama Persediaan	Jumlah Unit	Satuan	Harga/Unit	Total
117.01.05.016.36	Wipol Tanpa Merk	17	Botol	21.450,00	364.650,00
117.01.05.016.76	Lap Gantung Tanpa Merk	2	Buah	18.150,00	36.300,00
	SUB TOTAL Persediaan Peralatan Keb			0,00	738.100,00
117.01.09.018.1	Map Dinas Tanpa Merk	75	Buah	30.800,00	2.310.000,00
	SUB TOTAL Persediaan Barang Cetak:			0,00	2.310.000,00
117.02.07.034.89	Sabun Sunlight Tanpa Merk	7	Botol	22.550,00	157.850,00
	SUB TOTAL Persediaan Perlengkapan			0,00	157.850,00
117.03.01.015.157	Pelampung Penanda Batas (Buoy) Tanpa Merk	1	Buah	38.820.000,00	138.820.000,00
	SUB TOTAL Persediaan Barang Yang ,			0,00	138.820.000,00
	JUMLAH			0,00	189.839.100,00

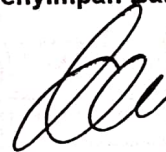
Kepala SKPD / UPTD



Ir. H. Amir Bakry, MP

NIP : 19640205 199403 1 001

Penyimpan Barang



Diah Nur Maulida, S.Pi

NIP : 19920911 201503 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

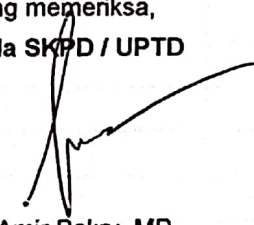
No.

Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

SKPD / UPT : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.01.01	Persediaan Alat Tulis Kantor	550	34.235.685,00	5.525	142.504.890,00	5.397	129.937.885,00	678	46.802.690,00
117.01.03	Persediaan Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25	584.925,00	133	3.418.800,00	116	2.993.265,00	42	1.010.460,00
117.01.04	Persediaan Perangko, Materai, Kuasi dan Benda Pos Lainnya	0	0,00	2.016	12.096.000,00	2.016	12.096.000,00	0	0,00
117.01.05	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	18	453.904,00	315	11.052.250,00	302	10.768.054,00	31	738.100,00
117.01.09	Persediaan Barang Cetakan	0	0,00	1.563	50.666.070,00	1.488	48.356.070,00	75	2.310.000,00
117.02.02	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	1	99.834.999,00	1	99.834.999,00	0	0,00
117.02.07	Persediaan Perlengkapan Dinas, Perlengkapan Olahraga dan Keterampilan	0	0,00	299	567.078.740,00	292	566.920.890,00	7	157.850,00
117.03.01	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga (Hibah)	0	0,00	63	2.398.193.500,00	62	2.259.373.500,00	1	138.820.000,00
	JUMLAH	0	35.274.514,00	0	3.284.845.249,00	0	3.130.280.663,00	0	189.839.100,00

Yang memeriksa,
Kepala SKPD / UPTD
Ir. H. Amir Bakry, MP

NIP : 19640205 199403 1 001

Penyimpanan Barang


Diah Nur Maulida, S.Pi

NIP : 19920911 201503 2 004

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.

Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

SKPD / UPT : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.01.01.002	Amplop Paper Line Besar	0	0,00	50	1.529.000,00	40	1.223.200,00	10	305.800,00
117.01.01.003	Ballpoint Pilot Baliner BI-5M	0	0,00	180	4.415.400,00	140	3.434.200,00	40	981.200,00
117.01.01.003	Ballpoint Pilot G-207	10	198.000,00	240	5.887.200,00	100	2.405.700,00	150	3.679.500,00
117.01.01.003	Ballpoint G2	5	99.000,00	0	0,00	5	99.000,00	0	0,00
117.01.01.003	Ballpoint E-Pro	0	0,00	120	448.800,00	120	448.800,00	0	0,00
117.01.01.003	Ballpoint Balliner Pilot	30	392.040,00	12	294.360,00	42	686.400,00	0	0,00
117.01.01.005	Buku Agenda Folio	0	0,00	10	305.800,00	10	305.800,00	0	0,00
117.01.01.005	Buku Kwitansi (isi 40 Lembar)	0	0,00	10	61.600,00	0	0,00	10	61.600,00
117.01.01.005	Buku Kas Folio	0	0,00	10	305.800,00	10	305.800,00	0	0,00
117.01.01.005	Buku Kwitansi (Isi 100 Lembar)	40	237.600,00	0	0,00	40	237.600,00	0	0,00
117.01.01.012	Paper Clips Jumbo	10	71.500,00	0	0,00	10	71.500,00	0	0,00
117.01.01.012	Paper Clips Kecil	10	30.250,00	0	0,00	10	30.250,00	0	0,00
117.01.01.012	Paper Clip No.3	10	30.250,00	0	0,00	10	30.250,00	0	0,00
117.01.01.012	Paper Clip No.5	10	71.500,00	0	0,00	10	71.500,00	0	0,00
117.01.01.012	Trigonal Clip No.3	0	0,00	50	187.000,00	45	168.300,00	5	18.700,00
117.01.01.014	File Box Besar	0	0,00	58	1.422.740,00	53	1.300.090,00	5	122.650,00
117.01.01.017	Penggaris Mica Ukuran 30 Cm	0	0,00	12	59.400,00	12	59.400,00	0	0,00
117.01.01.020	Gunting Besar	0	0,00	10	123.200,00	8	98.560,00	2	24.640,00
117.01.01.021	Staples Kangaroo Besar	0	0,00	2	110.440,00	2	110.440,00	0	0,00
117.01.01.021	Staples Hd 50	0	0,00	20	1.104.400,00	20	1.104.400,00	0	0,00
117.01.01.021	Staples Hd 10	0	0,00	20	440.000,00	16	352.000,00	4	88.000,00
117.01.01.022	Isi Staples No.3	0	0,00	42	360.360,00	29	248.820,00	13	111.540,00
117.01.01.022	Isi Staples 10-1M	100	297.000,00	5	41.250,00	105	338.250,00	0	0,00
117.01.01.022	Isi Staples No. 10	0	0,00	50	247.500,00	45	222.750,00	5	24.750,00
117.01.01.022	Isi Staples No. 1213	0	0,00	10	331.100,00	10	331.100,00	0	0,00
117.01.01.022	Isi Staples No. 1215	0	0,00	10	343.200,00	10	343.200,00	0	0,00
117.01.01.025	Isi Pisau Cutter Kecil	0	0,00	20	176.000,00	20	176.000,00	0	0,00
117.01.01.027	Binder Clip No. 260	0	0,00	600	2.178.000,00	600	2.178.000,00	0	0,00
117.01.01.027	Binder Clip No. 155	0	0,00	840	2.125.200,00	800	2.024.000,00	40	101.200,00
117.01.01.027	Binder Clip No. 107	0	0,00	840	1.108.800,00	840	1.108.800,00	0	0,00
117.01.01.030	Kertas A3 70 Gr	0	0,00	20	2.354.000,00	0	0,00	20	2.354.000,00
117.01.01.037	Kertas A4 70 Gr	0	0,00	90	5.445.000,00	90	5.445.000,00	0	0,00
117.01.01.037	Kertas A4 80 Gr	0	0,00	105	6.953.100,00	105	6.953.100,00	0	0,00
117.01.01.030	Kertas F4 70 Gr	30	1.518.000,00	185	12.250.700,00	195	12.444.300,00	20	1.324.400,00
117.01.01.030	Kertas F4 80 Gr	0	0,00	85	6.264.500,00	85	6.264.500,00	0	0,00

No.

Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

SKPD / UPT : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.01.01.051	Kertas Cover Linen	0	0,00	20	1.474.000,00	20	1.474.000,00	0	0,00
117.01.01.051	Kertas Cover F4	0	0,00	20	981.200,00	20	981.200,00	0	0,00
117.01.01.056	Lem Stick Kecil	0	0,00	60	739.200,00	24	295.680,00	36	443.520,00
117.01.01.056	Lem Pronto Glue Stick	0	0,00	24	295.680,00	24	295.680,00	0	0,00
117.01.01.057	Lem Cair Kecil	10	79.200,00	0	0,00	10	79.200,00	0	0,00
117.01.01.056	Lem Kental Kecil	15	118.800,00	0	0,00	15	118.800,00	0	0,00
117.01.01.061	Map Biola (ATK)	10	89.100,00	0	0,00	10	89.100,00	0	0,00
117.01.01.061	Map Jepit (ATK)	0	0,00	84	1.296.240,00	62	945.340,00	22	350.900,00
117.01.01.061	Map Dokumen Isi 40	40	928.400,00	0	0,00	40	928.400,00	0	0,00
117.01.01.064	Ordner Bambi	0	0,00	50	1.226.500,00	50	1.226.500,00	0	0,00
117.01.01.064	Ordner Benex	0	0,00	39	1.082.400,00	39	1.082.400,00	0	0,00
117.01.01.065	Penghapus Pensil	15	93.225,00	22	185.900,00	37	279.125,00	0	0,00
117.01.01.070	Pensil 2B	5	19.800,00	60	442.200,00	65	462.000,00	0	0,00
117.01.01.073	Pisau Cutter L-500 Kenko	0	0,00	12	236.280,00	12	236.280,00	0	0,00
117.01.01.076	Lakban Hitam 2"	0	0,00	20	440.000,00	18	396.000,00	2	44.000,00
117.01.01.076	Lakban Hitam 1	10	200.970,00	0	0,00	10	200.970,00	0	0,00
117.01.01.076	Lakban Bening 2"	0	0,00	10	171.600,00	8	137.280,00	2	34.320,00
117.01.01.076	Lakban Double Tip 1 "	0	0,00	20	246.400,00	12	147.840,00	8	98.560,00
117.01.01.076	Lakban Double Tip 2 "	0	0,00	30	552.750,00	30	552.750,00	0	0,00
117.01.01.091	Spidol Whiteboard BG 12	10	95.700,00	24	295.680,00	34	391.380,00	0	0,00
117.01.01.091	Spidol Whiteboard 500	3	26.730,00	0	0,00	3	26.730,00	0	0,00
117.01.01.093	Stabilo Kecil	11	128.260,00	50	495.000,00	51	524.260,00	10	99.000,00
117.01.01.095	Bantalan Stempel No. 1	0	0,00	6	257.400,00	6	257.400,00	0	0,00
117.01.01.097	Stopmap Folio	0	0,00	200	726.000,00	200	726.000,00	0	0,00
117.01.01.097	Stopmap Folio Kertas	0	0,00	300	1.089.000,00	270	980.100,00	30	108.900,00
117.01.01.097	Stopmap Plastik Kancing	0	0,00	48	295.680,00	48	295.680,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Printer Epson Warna (Ori)	15	2.772.000,00	9	1.435.500,00	24	4.207.500,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Printer Epson Hitam Blueprint	0	0,00	20	1.716.000,00	20	1.716.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Stempel Yamura	0	0,00	12	514.800,00	12	514.800,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Epson 6641	0	0,00	20	3.190.000,00	20	3.190.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Epson 6642	0	0,00	20	3.190.000,00	20	3.190.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Epson 6643	0	0,00	20	3.190.000,00	20	3.190.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Epson 6644	0	0,00	40	6.380.000,00	34	5.423.000,00	6	957.000,00
117.01.01.101	Tinta Printer Canon Hitam	8	660.000,00	0	0,00	8	660.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Printer Canon Warna	10	825.000,00	0	0,00	10	825.000,00	0	0,00
117.01.01.101	Tinta Printer Epson Hitam (Ori)	30	5.544.000,00	5	797.500,00	35	6.341.500,00	0	0,00

No.

SKPD / UPT : 3.01.01-DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Periode : 01-01-2018 s.d. 31-12-2018

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.01.01.105	Page Marker 4 Mix Color Uk. 1"x1,5"	0	0,00	50	495.000,00	50	495.000,00	0	0,00
117.01.01.111	Kertas Foto Glossy 260	0	0,00	20	981.200,00	20	981.200,00	0	0,00
117.01.01.113	Penggaris Besi 30 Cm	0	0,00	12	221.760,00	12	221.760,00	0	0,00
117.01.01.113	Penggaris Besi 50 Cm	0	0,00	12	442.200,00	12	442.200,00	0	0,00
117.01.01.114	Rautan Pensil Kecil	0	0,00	24	87.120,00	24	87.120,00	0	0,00
117.01.01.115	Kertas Ncr Folio 5 Ply	90	17.127.000,00	200	35.200.000,00	100	18.887.000,00	190	33.440.000,00
117.01.01.115	Post-It Kecil	0	0,00	60	514.800,00	58	497.640,00	2	17.160,00
117.01.01.115	Post-It Sedang	0	0,00	20	490.600,00	15	367.950,00	5	122.650,00
117.01.01.121	Tipe X Kenko	2	14.300,00	0	0,00	2	14.300,00	0	0,00
117.01.01.121	Clear Holder 80	0	0,00	40	1.962.400,00	2	98.120,00	38	1.864.280,00
117.01.01.121	Id Card Peserta & Panitia	0	0,00	72	1.188.000,00	72	1.188.000,00	0	0,00
117.01.01.121	Pelubang Kertas Sedang	0	0,00	10	797.500,00	10	797.500,00	0	0,00
117.01.01.121	Kertas Mika Transparan	0	0,00	5	214.500,00	5	214.500,00	0	0,00
117.01.01.121	Double Tape Foam 1	0	0,00	10	123.200,00	10	123.200,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon Pg 810 Black	0	0,00	12	3.689.400,00	12	3.689.400,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon CI 811 Color	0	0,00	12	4.435.200,00	12	4.435.200,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon 88 Hitam	4	1.199.880,00	0	0,00	4	1.199.880,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon 98 Warna	4	1.343.760,00	0	0,00	4	1.343.760,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon Hitam No. 810 (Sat. Kotak)	0	0,00	3	922.350,00	3	922.350,00	0	0,00
117.01.01.125	Cartridge Canon Warna No. 811 (Sat. Kotak)	0	0,00	2	739.200,00	2	739.200,00	0	0,00
117.01.01.135	Pembuka Staples	0	0,00	10	183.700,00	10	183.700,00	0	0,00
117.01.03.002	Baterai A2	15	254.925,00	20	319.000,00	35	573.925,00	0	0,00
117.01.03.002	Baterai A3	0	0,00	20	294.800,00	16	235.840,00	4	58.960,00
117.01.03.002	Baterai Segi Empat Mic	10	330.000,00	0	0,00	10	330.000,00	0	0,00
117.01.03.007	Kabel Listrik	0	0,00	3	1.485.000,00	2	990.000,00	1	495.000,00
117.01.03.015	Steker Dengan Arder	0	0,00	20	330.000,00	17	280.500,00	3	49.500,00
117.01.03.020	Stop Kontak	0	0,00	20	440.000,00	17	374.000,00	3	66.000,00
117.01.03.025	Niso Ducting Tc-4	0	0,00	50	550.000,00	19	209.000,00	31	341.000,00
117.01.04.001	Materai Rp. 6000,-	0	0,00	2.016	12.096.000,00	2.016	12.096.000,00	0	0,00
117.01.05.004	Gayung Air	0	0,00	2	36.300,00	2	36.300,00	0	0,00
117.01.05.005	Kanebo Spon	0	0,00	20	1.573.000,00	19	1.494.350,00	1	78.650,00
117.01.05.005	Pengharum Mobil Gantung	0	0,00	20	363.000,00	20	363.000,00	0	0,00
117.01.05.010	Pembersih Kaca Refill	0	0,00	5	74.250,00	5	74.250,00	0	0,00
117.01.05.010	Sabun Cuci Piring Bungkus	0	0,00	24	541.200,00	24	541.200,00	0	0,00
117.01.05.010	Sabun Cuci Piring Botol	4	89.760,00	0	0,00	4	89.760,00	0	0,00
117.01.05.010	Sabun Cuci Tangan Botol	0	0,00	25	951.500,00	21	797.500,00	4	154.000,00

LAPORAN MUTASI BARANG

Kode	Nama Barang	Saldo Awal		Masuk		Keluar		Saldo	
		Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
117.01.05.010	Pembersih Lantai	4	104.544,00	0	0,00	4	104.544,00	0	0,00
117.01.05.011	Refill Pengharum Ruangan Stella sweet rainbow	0	0,00	25	976.250,00	25	976.250,00	0	0,00
117.01.05.011	Pengharum Ruangan Otomatis Kecil	0	0,00	20	1.735.250,00	19	1.653.850,00	1	81.400,00
117.01.05.011	Pengharum Ruangan Otomatis Kecil (Refill)	0	0,00	5	195.250,00	5	195.250,00	0	0,00
117.01.05.011	Pengharum Ruangan Gantung Stella	0	0,00	30	544.500,00	30	544.500,00	0	0,00
117.01.05.012	Kemoceng Biasa	0	0,00	5	60.500,00	5	60.500,00	0	0,00
117.01.05.012	Sapu Lantai	0	0,00	3	254.100,00	3	254.100,00	0	0,00
117.01.05.013	Plastik Sampah	0	0,00	8	968.000,00	8	968.000,00	0	0,00
117.01.05.013	Tong Sampah Kotak	0	0,00	5	605.000,00	5	605.000,00	0	0,00
117.01.05.014	Tissue Box	10	259.600,00	40	726.000,00	50	985.600,00	0	0,00
117.01.05.016	Spon Pencuci Piring	0	0,00	35	134.750,00	29	111.650,00	6	23.100,00
117.01.05.016	Kain Serbet Gantung	0	0,00	15	726.000,00	15	726.000,00	0	0,00
117.01.05.016	Wipol	0	0,00	24	514.800,00	7	150.150,00	17	364.650,00
117.01.05.016	Alat Pembersih Kaca Biasa	0	0,00	2	36.300,00	2	36.300,00	0	0,00
117.01.05.016	Lap Gantung	0	0,00	2	36.300,00	0	0,00	2	36.300,00
117.01.09.002	Undangan Lengkap	0	0,00	30	726.000,00	30	726.000,00	0	0,00
117.01.09.003	Buku Agenda Surat Masuk/ Keluar	0	0,00	4	121.440,00	4	121.440,00	0	0,00
117.01.09.006	Cetak Laporan	0	0,00	1	750.000,00	1	750.000,00	0	0,00
117.01.09.012	Lembar Disposisi	0	0,00	100	8.385.000,00	100	8.385.000,00	0	0,00
117.01.09.014	Leaflet Lain-Lain	0	0,00	500	9.955.000,00	500	9.955.000,00	0	0,00
117.01.09.017	ID Card (Cetak)	0	0,00	100	770.000,00	100	770.000,00	0	0,00
117.01.09.018	Map Dinas	0	0,00	500	15.400.000,00	425	13.090.000,00	75	2.310.000,00
117.01.09.018	Map Jepit	0	0,00	4	58.960,00	4	58.960,00	0	0,00
117.01.09.018	Map Plastik	0	0,00	12	73.920,00	12	73.920,00	0	0,00
117.01.09.019	Sertifikat	0	0,00	303	3.288.250,00	303	3.288.250,00	0	0,00
117.01.09.019	Spanduk	0	0,00	9	11.137.500,00	9	11.137.500,00	0	0,00
117.02.02.086	Demplot agroforestry	0	0,00	1	99.834.999,00	1	99.834.999,00	0	0,00
117.02.07.032	Tissue	0	0,00	120	2.178.000,00	120	2.178.000,00	0	0,00
117.02.07.034	Sabun Sunlight	0	0,00	12	270.600,00	5	112.750,00	7	157.850,00
117.02.07.056	Piala	0	0,00	9	4.950.000,00	9	4.950.000,00	0	0,00
117.02.07.066	Seminar Kit	0	0,00	10	418.949.440,00	10	418.949.440,00	0	0,00
117.02.07.066	Tas Seminar Kit	0	0,00	85	25.341.250,00	85	25.341.250,00	0	0,00
117.02.07.066	Buku Panduan	0	0,00	32	704.000,00	32	704.000,00	0	0,00
117.02.07.067	Piala	0	0,00	4	3.740.000,00	4	3.740.000,00	0	0,00
117.02.07.067	Piala Utama	0	0,00	5	4.812.500,00	5	4.812.500,00	0	0,00
117.02.07.067	Piala K1	0	0,00	15	14.437.500,00	15	14.437.500,00	0	0,00